

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dari segi komunikasi antara DPRD dengan stakeholder, salah satunya adalah Lembaga Adat melayu (LAM) cenderung hanya bersifat administratif, yaitu hanya terbatas pada pengajuan proposal dan pembahasan anggaran kegiatan. Meskipun memunculkan keterlibatan DPRD, pelestarian kebudayaan belum di jadikan bagian integral dari kebijakan strategis yang berorientasi jangka panjang. Namun begitu masih terlihat inisiatif dari anggota DPRD, salah satunya adalah dengan menjadikan kebudayaan ke dalam bagian dari kurikulum pendidikan melalui muatan lokal (mulok) ataupun penerapan kebijakan simbolis seperti pemakaian pakaian adat yang dapat menunjukan potensi untuk memperkuat identitas budaya. Langkah ini dapat meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap budaya lokal, serta dapat berdampak pada ekonomi melalui sektor-sektor pendukung seperti pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudah ada upaya yang dilakukan oleh Anggota DPRD namun terkesan belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan.
2. Adapun tantangan dari penerapan Nilai-Nilai Trisakti oleh anggota DPRD adalah karena ego politik Dapil dan kurangnya inisiatif kolektif yang membuat

upaya pelestarian kebudayaan cenderung parsial dan tidak memiliki dampak sistematis terhadap keberlanjutan kebudayaan. Tidak adanya aksi nyata yang signifikan dari DPRD atau fraksi PDI Perjuangan dalam hal pelestarian budaya.

Selain itu minimnya perhatian terhadap pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan daerah, karena berdasarkan temuan di lapangan masih banyak terdapat situs dan cagar budaya terabaikan. Selain itu kendala lainnya di mana cagar budayanya nasional yang pengelolaannya masih di bawah pemerintah pusat atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan bukan langsung di bawah wewenang pemerintah daerah. Selain itu kendala dalam upaya ini adalah, walaupun ada dorongan dalam bentuk anggaran, implementasi kebijakan ini masih terhambat oleh kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikan program-program tersebut. Selain itu kendala lain yang dihadapi adalah terletak pada posisi PDI Perjuangan yang tidak berkuasa di eksekutif, serta kurangnya anggaran untuk program pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Tri Sakti menjadi hambatan terbesar dalam implementasi nilai-nilai kebudayaan.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, sudah ada niat baik dari Anggota DPRD Kota Jambi PDI Perjuangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Tri Sakti dalam sebuah kebijakan, namun tantangan besar masih dihadapi, baik dari sisi politik, sumber daya maupun komitmen pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Jambi diharapkan dapat meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder, termasuk Lembaga Adat Melayu (LAM), agar pelestarian budaya tidak hanya bersifat administratif tetapi menjadi kebijakan strategis yang berorientasi jangka panjang. Pemerintah Daerah Kota Jambi juga perlu lebih serius dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk revitalisasi situs budaya serta mengintegrasikan kebijakan kebudayaan dalam sektor pendidikan dan pariwisata. Selain itu, masyarakat dan LSM diharapkan berperan aktif melalui kampanye kesadaran publik untuk mengangkat pentingnya pelestarian kebudayaan sebagai bagian dari identitas lokal. Akademisi juga dapat mengambil peran dengan mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai tantangan birokrasi dan politik dalam pelestarian budaya, serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi implementasi nilai-nilai Trisakti di bidang kebudayaan pada wilayah yang berbeda, dengan menggunakan metode kuantitatif guna menganalisis hubungan signifikan antara peran birokrasi dan keberhasilan pelestarian budaya.